

**KONFLIK TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
DI KESULTANAN ACEH DARUSSALAM
TAHUN 1641-1699 M**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Oleh:

Supriyono

NIM: 07120022

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRIYONO
NIM : 07120022
Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan penelitian dan hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 Oktober 2011

Saya yang menandatangani


SUPRIYONO
NIM: 07120022



NOTA DINAS

Kepada Yth.,
**Dekan Fakultas Adab dan
Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamua'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**KONFLIK TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KESULTANAN
ACEH DARUSSALAM TAHUN 1641-1699 M**

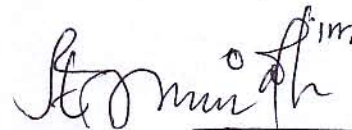
yang ditulis oleh:

Nama : Supriyono
NIM : 07120022
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 Oktober 2011
Dosen Pembimbing,



Siti Maimunah, S.Ag., M.Hum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adi sucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fak. (0274)513949
Web : <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail : adab@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/1510 /2011

Skripsi dengan judul :

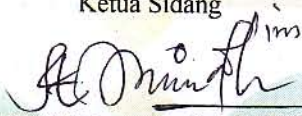
KONFLIK TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
DI KESULTANAN ACEH DARUSSALAM TAHUN 1641 – 1699 M

Nama : Supriyono
NIM : 07120022
Telah dimunaqasyahkan pada : 9 Nopember 2011
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

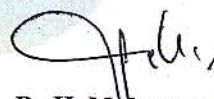
Ketua Sidang


Siti Maimunah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19710430 199703 2 002

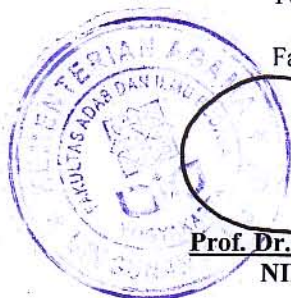
Penguji I

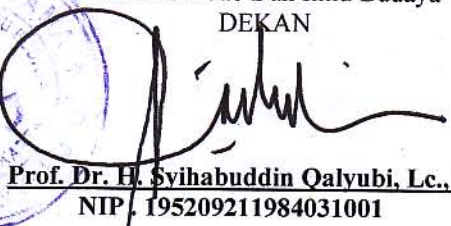

Zuhrotul latifah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19701008 199803 2 001

Penguji II


Dr.H. Muhammad Wildan, M.A
NIP. 19710403 199603 1 001

Yogyakarta, 17 November 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya
DEKAN




Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag
NIP. 195209211984031001

MOTTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Ali-Imran: (3): 103)

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujarat: (49): 13)

PERSEMBAHAN

AKU PERSEMBAHAN KARYA INI

Untuk

Ayahanda Giyanto dan ibunda Suratinem tercinta serta keluarga besarku

*Terimakasih atas dukungan dan doanya yang tak kunjung putus selalu mendoakan saya
Hanya dengan ridha Ayah dan Ibu, serta ridho Allah s.w.t semuanya bisa terasa lebih ringan dan
mudah dalam penyelesaian skripsi ini.*

Untuk Almamaterku Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KONFLIK TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KESULTANAN ACEH DARUSSALAM TAHUN 1641-1699 M

Abstraksi

Paruh kedua abad ke XVII M merupakan periode krusial dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam, pada periode ini dipimpin oleh penguasa perempuan. Munculnya penguasa perempuan merupakan fenomena baru, sebab sebelum ini Aceh tidak pernah dipimpin oleh perempuan. Kesultanan Aceh Darussalam sangat menghargai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada saat itu. Meskipun demikian hal ini menimbulkan kontroversial, karena tidak semua ulama membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Padahal telah banyak diketahui bahwa Kesultanan Aceh Darussalam memegang teguh ajaran agama dan dibantu oleh ulama dalam pemerintahannya.

Konflik kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam terlihat ketika pegangkatan sultanah pertama yang menggantikan suaminya Sultan Iskandar Tsani tahun 1641 M. Konflik ini terus berlanjut sampai masa pemerintahan perempuan ke empat Sultanah Kamalat Syah tahun 1699 M. Meskipun telah ada persetujuan ulama kesultanan yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin, tetapi tidak semua mendukung seperti kelompok *wujudiyah* yang menentang kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa yang melatarbelakangi munculnya kepemimpinan perempuan, bagaimana perjalanan pro dan kontra kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1641-1699 M, dan bagaimana pengaruh kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam. Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang bertujuan merekonstruksi masa lampau secara kronologis dan sistematis, agar dapat memberikan gambaran tentang peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu serta diberikan tafsiran, dan analisis secara kritis sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Untuk mendapatkan analisis yang lebih mengenai konflik kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam pendekatan yang digunakan adalah *pendekatan politik* dan *pendekatan sosiologis*. Teori yang digunakan di sini adalah yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendof yaitu mengenai teori konflik. Pengumpulan data memanfaatkan studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan sumber tertulis seperti buku dan jurnal. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yakni proses menguji dan menganalisis secara kritis-analitis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh.

Hasil yang dapat diketahui adalah; pertama munculnya pemerintahan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam harus dilihat dari banyak faktor seperti

politik, sosial, agama dan ekonomi. Kombinasi dari berbagai faktor yaitu; tidak adanya putera mahkota dan merosotnya kekuasaan para sultan yang ditandai dengan meningkatnya kekuasaan para orang kaya serta pembagian Aceh ke dalam Tiga Sagi yang kuat ini merupakan faktor-faktor penentu muncul dan bertahannya pemerintahan perempuan di Aceh.

Kedua, konflik kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam tidak hanya menjadi isu politik semata tetapi sudah menyentuh wilayah agama. Sebab konflik ini terjadi antara pendukung ratu yang didukung ulama kesultanan dengan kelompok *wujudiyah* yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Perubahan-perubahan yang terjadi dan kebebasan yang dimiliki oleh orang kaya, panglima sagi dan *uleebalang* menjadikan konflik ini semakin meningkat, sebab mereka mementingkan diri sendiri. Pada akhirnya kondisi ini mempercepat berakhirnya pemerintahan perempuan dan adanya fatwa dari Mekkah yang menyatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, maka Sultanah Kamalat Syah dimakzulkan dari tahta Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1699 M. Ketiga, konflik ini membawa pengaruh terhadap hilangnya daerah kekuasaan Aceh dan meningkatnya kedudukan perempuan di Aceh yang aktif dalam berbagai bidang.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah s.w.t., Tuhan semesta alam Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad s.a.w beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi berjudul “Konflik Tentang Kepemimpinan Perempuan Di Kesultanan Aceh Darussalam Tahun 1641-1699 M” ini merupakan upaya penulis untuk memahami peristiwa yang melanda Kesultanan Aceh Darussalam dalam kurun waktu tersebut. Konflik ini pada akhirnya membawa Kesultanan Aceh Darussalam pada fase kemunduran. Pada realitasnya proses penulisan skripsi ini tidak semudah yang dibayangkan. Ada berbagai kendala yang dihadapi penulis, salah satunya adalah kesulitan dalam melacak sumber karena mayoritas sumber adalah sumber-sumber lama.

Selesainya skripsi ini bukanlah semata-mata karena usaha penulis, melainkan atas bantuan berbagai pihak. Orang yang pertama pantas mendapatkan penghargaan dan ucapan terima kasih adalah Ibu Siti Maimunah, S.Ag., M.Hum sebagai pembimbing. Di tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan waktu untuk

memberi pengarahan dan bimbingan serta mengoreksi tulisan skripsi penulis. Ketelitiannya dalam mengoreksi tata bahasa bahkan tanda baca merupakan pelajaran tersendiri yang sangat berharga bagi penulis. Oleh karena itu, tiada kata yang pantas diucapkan selain terima kasih disertai do'a semoga jerih payahnya mendapat balasan yang setimpal di sisi-Nya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. H. Syihabudin Qalyubi, Lc., M.Ag., : Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Dr. Maharsi, M.Hum., : Ketua Jurusan SKI; Zuhrotul Lathifah, S.Ag., M.Hum., Dosen Penasehat Akademik (PA) dan seluruh dosen di Jurusan SKI yang telah mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis sehingga penulis banyak memperoleh kemanfaatannya, dan semua pegawai TU Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuannya.

Terima kasih yang mendalam disertai rasa haru dan hormat penulis ucapkan kepada keluarga tercinta terutama Ibunda Suratinem dan Ayahanda Giyanto yang selalu memberikan semangat, motivasi, nasehat, do'a, biaya, dan kasih sayangnya dengan penuh keridhoan dan keikhlasan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada mas ku, Suharliyani yang selalu memberi motifasi untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih dan untuk adik penulis, Eka Purwati yang saat ini sedang menimba ilmu semoga diberi kemudahan dalam memahami dan menelaah ilmu di perguruan tinggi. Kekasih hatiku yang selalu setia menungguku dan mendoakanku, atas doa dan motifasinya penulis bisa menyelesaikan

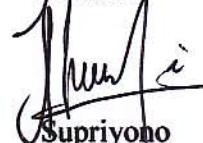
skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga bapak Setiyo Raharjo, Mbah Warni dan Mbak Dewi, terima kasih semua atas dukungannya.

Semua teman-teman jurusan SKI angkatan 2007, Rahman, Sidiq, Juma, Simon, Budi, Andri, Haryono, Yeni, Cinung, Chiot, Opick, Fitri Sari, Fitri Azizah, Nurjanah, Khotijah, Ningrum, dan lain-lain. Semoga kebersamaan dan canda tawa kita selama ini serta saling *support* akan menjadi kenangan yang paling indah dalam hidup ini, sehingga memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga kepada keluarga besar HMI Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya, tempat di mana saya banyak belajar tentang keorganisasian dan makna kedewasaan. Khususnya angkatan 2007 yang pernah bersama saya, Sirno, Fauzi, Jumek, Zikri, Rahman, Cinung, dan semua teman-teman yang gak bisa disebut semuanya semoga ukhuwah itu tetap terjaga.

Hanya do'a yang mampu penulis sampaikan, atas semua bantuannya semoga bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah s.w.t, yang tercurah dari kesadaran lubuk hati yang paling dalam. Kekurangan dan kekeliruan di dalam penulisan skripsi ini berasal dari penulis, sedangkan kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 24 Oktober 2011
26 Dzulqa'dah 1432 H

Penulis



Supriyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Landasan Teori.....	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : LATAR BELAKANG MUNCULNYA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KESULTANAN ACEH DARUSSALAM.....	20
A. Kondisi Politik.....	20
B. Kondisi Sosial Keagamaan	25

C. Kondisi Ekonomi	31
BAB III : PRO DAN KONTRA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KESULTANAN ACEH DARUSSALAM.....	37
A. Awal Munculnya Penguasa Perempuan.....	37
B. Masa Konflik Pemerintahan perempuan.....	40
a. Masa Sultanah Safiatuddin Syah.....	40
b. Masa Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah	48
c. Masa Sultanah Zaqiatuddin Inayat Syah	52
d. Masa Sultanah Kamalat Syah.....	58
C. Dukungan Ulama Terhadap Pemerintahan Perempuan.....	61
BAB IV : PENGARUH KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KESULTANAN ACEH DARUSSALAM.....	66
A. Hilangnya Daerah Kekuasaan Aceh.....	66
B. Kedudukan Perempuan Di Aceh.....	72
BAB V : PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah sebuah wilayah yang terletak di ujung Pulau Sumatra. Dalam perjalanan sejarahnya, di kawasan ini terdapat beberapa kerajaan Islam, seperti Pasai, Pedir (Pidei), Daya, Lamuri dan Aceh Darussalam. Semua kerajaan ini telah memainkan peran penting dalam bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi. Hal ini berbeda dengan Kesultanan Aceh Darussalam yang memberikan kepada kaum perempuan kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki.

Meskipun demikian, kedudukan perempuan pada tahta tertinggi suatu kesultanan sering menjadi isu yang kontroversial. Fenomena sejarah yang terjadi perlu untuk melihat kembali sejarah masa lalu umat Islam. Kesultanan Aceh Darussalam menjadikan Islam sebagai dasar negara dan *Qanun Meukuta Alam*¹ sebagai sumber hukumnya. Adanya dasar ini menjadikan kedudukan perempuan disetarakan dengan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹*Qanun Meukuta Alam* merupakan sebuah undang-undang dasar kerajaan yang disusun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Undang-undang ini bertujuan sebagai penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya. Undang-undang Qanun Meukuta Alam sering disebut juga “Adat Meukuta Alam” atau “Adat Aceh”. Undang-undang ini menjelaskan hal ihwal yang berhubungan dengan negara, baik yang mengenai dasar negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan dalam negara, dan lembaga-lembaga negara. Masa selanjutnya Qanun Meukuta Alam disempurnakan menjadi sebuah undang-undang yang lengkap yang mengatur semua aspek. Lihat Hasjmy, *59 Tahun Aceh di Bawah Pemerintahan Ratu* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 129.

Bangkitnya penguasa perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam harus dilihat dari latar belakang sosial, politik yang menyebabkan suksesi sultanah pertama Safiatuddin Syah naik tahta. Menjelang penobatannya timbul sedikit pertentangan di kalangan pembesar Aceh, karena Sultan Iskandar Tsani tidak berputera dan ada pula yang mempermasalahkan soal kelayakan perempuan dalam kedudukan sebagai seorang ratu. Mereka mengklaim bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin (penguasa). Dasar pemikirannya adalah perempuan secara natural tidak memiliki kapabilitas untuk berkuasa dan memimpin, sebagaimana ia tidak diperbolehkan menjadi pemimpin (imam) dalam salat, perempuan juga tidak dapat menjadi pemimpin dalam masyarakat (umat).²

Keberhasilan perempuan menduduki tahta tertinggi di Kesultanan Aceh Darussalam terjadi tahun 1641 M setelah meninggalnya Sultan Iskandar Tsani yang tidak meninggalkan pewaris laki-laki, berakibat pada munculnya krisis suksesi di Kesultanan Aceh Darussalam. Akibat dari krisis ini menimbulkan konflik di kalangan ulama, terutama menjelang penobatan Sultanah Safiatuddin Syah menjadi ratu di Kesultanan Aceh Darussalam. Kaum ulama yang berpegangan kepada qias hukum agama (Islam) ia tidak boleh menjadi raja (ratu), karena tidak sah menjadi wali 'am³ dalam pernikahan.⁴

² Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 125.

³ Wali 'am dalam hukum fiqh mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, sehingga perempuan pada saat menikah jika tidak memiliki orang tua harus mewakilkan wali 'am kepada wali hakim.

⁴ Ismail Sofyan, *Wanita Nusantara dalam Lintas Sejarah or Prominent Women in The Glimpse of history*, terj. Bakdi Sumanto (Jakarta: Jayakarta Agung, 1994), hlm. 43.

Adanya kebijakan dan kekayaan harta pusaka dari ayahnya dan pertolongan ulama Nuruddin al-Raniri dan Abdurrauf Singkel sultanah dapat naik tahta di Kesultanan Aceh Darussalam. Pengangkatan sultanah ditinjau kepada pengangkatan Ratu Raziyatuddin dari negeri Dehli (India) yang memegang kekuasaan pada tahun 1236 M, meraih tahta dari ayahnya Sultan Iltutmisy Raja Dehli. Ratu Syajarat al-Durr menduduki tahta Dinasti Mamluk tahun 1250 M, dengan mengambil alih tahta dari suaminya Malik al-Shalih, dan Ratu Naihriyah dari Samudra Pasai tahun 1400 M.⁵ Atas kebijakan Abdurrauf Singkel wali 'am itu diserahkan kepada abangnya Teuku Itam dari Panglima Sagi XXII mukim.⁶

Permasalahan lain yang perlu dikaji lebih dalam selain mengenai konflik kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam, adalah persoalan kelompok *wujudiyah* yang pahamnya terkenal dengan ajaran *wahdah al-wujud* yang berarti keesaan wujud. Dalam istilah tasawuf Islam adalah suatu paham

⁵ M. Zainuddin, *Srikandi Atjeh* (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1966), hlm. 22., lihat juga Fatimah Mernisi, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, terj. Rahmani Astuti dan Enna Hadi (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 141.

⁶ *Mukim* adalah kumpulan beberapa *gampong* (kampung/kelurahan) yang disatukan oleh ibadah Jum'at dalam sebuah Masjid. Sedangkan *sagi* atau *sagoe* merupakan kumpulan beberapa *nangroe* (kecamatan), *sagi-sagi* tersebut adalah *Sagoe duaploh dua* yang terdiri dari XXII mukim dan dipimpin oleh seorang Panglima *Sagoe* bergelar *Panglima Polem Sri Muda Perkasa* dan dibantu seorang *qadhi sagoe* yang bergelar *qadhi rabbul jalil*. *Sagoe Teungoh lheaplooh* yang terdiri dari XXV mukim yang dipimpin seorang Panglima *Sagoe* yang bergelar *Qadhi Malikul Alam Sri Setia Ulama* dan dibantu *qadhi sagoe* yang bergelar *Qadhi Rabbul Jalil*. *Sagoe duaplooh nam* terdiri dari XVI mukim yang dipimpin oleh seorang Panglima *Sagoe* yang bergelar *Sri Imam Muda* dan dibantu seorang *qadhi sagoe* yang bergelar *qadhi rabbul jalil*. Di atas panglima *Sagoe* terdapat kekuasaan tertinggi dalam susunan pemerintahan kerajaan Aceh yang dipimpin oleh seorang raja yang bergelar *Sultan Imam Malikul Adil* dan dibantu seorang *qadhi* kerajaan yang bergelar *Qadhi Malikul Adil*. Afadlal, dkk., *Runtuhnya Gampong di Aceh; Studi Masyarakat Desa yang Bergolak* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.61-62., Lihat juga A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh di Bawah Pemerintahan Ratu*, hlm. 133-134.

yang berdasarkan pada keesaan wujud Allah dan alam, karena itu konsepsinya tentang Tuhan tidak dapat dipisahkan dari konsepsinya tentang alam.⁷ Ajaran ini berkembang masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, sedangkan masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani kelompok ini tidak mendapat tempat yang istimewa, karena mufti kesultanan Nuruddin al-Raniri tidak sepaham dengan ajaran *wahdah al-wujud* yang diamalkannya.

Nuruddin al-Raniri sebagai mufti kesultanan yang tidak sepaham dengan ajaran *wahdah al-wujud* mempunyai wewenang untuk memberikan nasehat kepada Sultan Iskandar Tsani. Sultan memerintahkan kepada penganut paham *wahdah al-wujud* untuk mengubah pendapat mereka dan bertobat kepada Allah, karena kesesatan mereka tetapi hal ini sia-sia. Melihat kenyataan demikian sultan melakukan tindakan tegas terhadap kelompok *wujudiyah* yang telah menyimpang dari ajaran Islam.

Tindakan yang dilakukan kelompok *wujudiyah* pada masa pemerintahan sultanah pertama mengarah usaha pemberontakan. Dengan pertimbangan keamanan negara Sultanah Safiatuddin Syah mengambil tindakan keras dengan melarang berkembangnya paham *wujudiyah* di Kesultanan Aceh Darussalam. Segala buku atau kitab mengenai *wujudiyah* dinyatakan terlarang untuk dibaca dan disimpan, dalam hal ini bentuk karangan Syekh Hamzah Fansuri ataupun karangan Syekh Samsudin Sumatrani. Demikian juga karangan-karangan ulama

⁷ Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syekh Nuruddin al-Raniri* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 74.

pengikut keduanya.⁸ Akibat dari adanya pelarangan ini, maka terjadilah pemusnahan dan pembakaran umum terhadap kitab-kitab karangan kedua ulama tersebut.

Konflik kepemimpinan perempuan berakhir pada tahun 1699 M dengan turunnya Sultanah Kamalat Syah dari tahta Kesultanan. Akibat dari kuatnya tekanan kelompok oposisi untuk menjatuhkan pemerintahan ratu, serta adanya satu riwayat yang menyatakan bahwa mufti kesultanan yang baru akhirnya berpihak kepada golongan oposisi dan berangkat ke Mekkah untuk meminta fatwa kepada Mufti Besar Mekkah mengenai sah tidaknya perempuan menjadi Kepala Negara (ratu). Mufti ini kemudian mengirim surat ke Aceh menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi sultanah.⁹ Peristiwa ini menandakan akhir dari pemerintahan sultanah, dan pemerintahan selanjutnya dipegang oleh keturunan Arab, yaitu Sultan Badrullah Syarif Hasyim Jamal al-Din.¹⁰

Permasalahan yang menarik adalah Kesultanan Aceh Darussalam yang didirikan dengan dasar Islam dan dalam pemerintahannya mendapat dukungan para ulama. Meskipun demikian dalam perjalanannya dilanda konflik besar mengenai sah tidaknya perempuan menjadi sultanah (ratu). Berdasarkan latar

⁸ A. Hasjmy, *Syah dan Ahlulsunnah Saling Rebut Pengaruh dan Kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 54.

⁹ M. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid I (Medan: PT. Percetakan dan Penerbitan Waspada, 1981), hlm. 412., lihat juga A. Hasjmy, *59 tahun Aceh di Bawah Pemerintahan Ratu*, hlm. 215.

¹⁰ Hoesein Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh: Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh Berdasarkan Bahan-Bahan yang Terdapat dalam Karya Melayu*, terj. Teuku Abdul Hamid (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1983), hlm. 60.

belakang tersebut maka penulisan ini dilakukan untuk mengungkap sejarah konflik tentang kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam. Dengan demikian konflik kepemimpinan perempuan dapat dijadikan pelajaran sebelum menentukan sikap dalam kehidupan masa yang akan datang.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Pokok pembahasan yang dikaji dalam skripsi ini adalah konflik tentang kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah konflik yang terjadi tahun 1641-1699 M. Konflik ini dapat dikatakan sebagai konflik kekuasaan, sebab konflik yang terjadi di dalam sebuah pemerintahan karena ada pihak-pihak yang saling berselisih untuk mendapatkan atau mengambil alih kekuasaan tersebut. Kelompok yang pro adalah kelompok pendukung ratu yang didukung oleh ulama kesultanan, sedangkan kelompok yang kontra adalah kelompok *wujudiyah* yang didukung oleh kalangan politisi Aceh yang tidak setuju dengan pemerintahan perempuan atau yang lebih dikenal dengan kelompok oposisi. Penelitian mengenai konflik tentang kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam menggunakan batasan tahun 1641-1699 M. Konflik ini terjadi pada tahun 1641 M, setelah Sultan Iskandar Tsani meninggal dan tidak memiliki putera mahkota. Akibat dari meninggalnya Sultan Iskandar Tsani maka timbullah berbagai kesulitan mengenai pergantian sultan. Masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat pertama karena ahli waris tidak ada kedua karena Safiatuddin Syah adalah puteri Sultan Iskandar Muda dan

permaisuri Sultan Iskandar Tsani.¹¹ Meskipun telah ada pengganti sultan yakni Safiatuddin Syah sebagai ratu di Kesultanan Aceh Darussalam tidak membuat kondisi ini stabil karena adanya ulama yang tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan. Selain itu adanya kelompok orang kaya yang saling berebut kekuasaan, dan adanya kelompok *wujudiyah* (oposisi) yang membuat gerakan untuk menjatuhkan pemerintahan perempuan. Kelompok ini juga meminta bantuan kepada mufti Mekkah mengenai sah tidaknya perempuan menjadi ratu, keberhasilan kelompok oposisi terjadi tahun 1699 M. Keberhasilan kelompok oposisi karena dukungan ulama tidak kuat setelah meninggalnya Abdurrauf Singkel tahun 1693 M. Selain itu, desakan kelompok oposisi semakin kuat dan sultanah tidak mampu menghadapinya serta adanya fatwa mufti Mekkah yang menyatakan perempuan tidak boleh menjadi ratu maka sultanah ini diturunkan pada tahun 1699 M. Dengan turunnya Sultanah Kamalat Syah menandakan akhir dari konflik tentang kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam.

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami maka penulis menetapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan sebagai panduan dalam pengungkapan masalah ini yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya kepemimpinan perempuan?
2. Bagaimana perjalanan pro dan kontra kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1641-1699 M?

¹¹ M. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, hlm. 190.

3. Bagaimana pengaruh kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah haruslah mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas. Setidaknya ia memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian “Konflik tentang Kepemimpinan Perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1641-1699 M”, merupakan penelitian sejarah yang berusaha untuk mengungkap sebab musabab terjadinya konflik antara kelompok pendukung ratu dan kelompok *wujudiyah* (oposisi) di Kesultanan Aceh Darussalam. Dengan melihat sebab musabab yang terjadi akan melahirkan bentuk pergulatan politik keduanya, sehingga melahirkan pengaruh terhadap kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam.

Kajian ini juga memiliki arti penting dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan di bidang sejarah kebudayaan Islam terutama sejarah lokal. Karya sejarah mengenai kepemimpinan perempuan dipandang sangat berguna memberikan informasi mengenai sepak terjang perempuan pada masa lampau. Di samping itu, penelitian ini menambah wawasan khususnya bagi penulis dalam ilmu pengetahuan, terutama ilmu sejarah Islam yang menyangkut kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada masa lampau. Dengan melihat masa lalu dapat menjadi pelajaran yang berguna bagi masa depan sehingga sejarah Islam dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu kajian ini dapat

dijadikan referensi selanjutnya yang terkait dengan masalah konflik kepemimpinan perempuan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Kesultanan Aceh Darussalam telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti dari kalangan Indonesia maupun luar negeri. Kebanyakan penelitian mereka menitikberatkan pada masa pemerintahan laki-laki dan kerajaan Islam secara umum. Penelitian mengenai konflik kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1641-1699 M belum banyak diteliti dan kajiannya masih merupakan bagian dari suatu pembahasan yang lebih umum. Sumber-sumber yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

Buku yang berjudul *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid I, tahun 1981, yang ditulis oleh M. Said. Dalam buku ini telah diungkapkan secara umum mengenai Kesultanan Aceh Darussalam sejak masa awal sampai pada abad XX, kemudian dalam buku ini pada Bab XII dijelaskan secara umum mengenai kepemimpinan perempuan yang diperintah empat orang sultanah, mengenai kebijakan, dan pergulatan akhir dari polemik perempuan. Pembahasan ini hanya disinggung beberapa halaman yang menunjukkan bahwa pemerintahan masih dipegang kaum perempuan. Letak perbedaan buku ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis berusaha menjelaskan masalah konflik kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1641-1699 M, pada masa pemerintahan empat sultanah secara menyeluruh.

Buku yang berjudul *Aceh, Sejarah, Budaya dan Tradisi*, tahun 2010, yang ditulis oleh Amirul Hadi, buku ini berusaha menjelaskan awal berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam sampai pada kebangkitan intelektual di Kesultanan Aceh pada abad ke XVI dan XVII M. Pada Bab IV dijelaskan pengaruh ulama pada Kesultanan Aceh, dalam hal ini menyangkut masalah kelayakan perempuan menjadi pemimpin yang dijelaskan secara sepintas dan kajian mengenai tradisi intelektual di Aceh mencakup masa keemasan Kesultanan Aceh Darussalam. Letak perbedaan buku ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis berusaha menjelaskan secara detail tentang konflik kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam.

Buku yang berjudul *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*, tahun 1977, ditulis oleh A. Hasjmy, buku ini menjelaskan secara umum mengenai kepemimpinan empat orang ratu di Kesultanan Aceh Darussalam. Penjelasan yang diberikan penulis dalam buku ini menyangkut masalah kebijakan pemerintahan perempuan dan usaha yang dilakukan dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda (VOC). Pada bab II dijelaskan secara umum mengenai pertentangan kelompok *wujudiyah* sebagai awal dari lahirnya konflik perempuan karena tidak mendukung penunjukan sultanah sebagai pemimpin dan perebutan tahta setelah meninggalnya mufti kesultanan. Letak perbedaan buku ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis berusaha untuk menjelaskan lebih detail mengenai konflik kepemimpinan perempuan di

Kesultanan Aceh Darussalam yang bermula dari pengangkatan ratu pertama menjadi sultanah dan berakhirnya konflik tahun 1699 M.

Buku yang berjudul *Wanita Utama dalam Lintas Sejarah*, tahun 1994, ditulis oleh Ismail Sofyan, dkk. Menjelaskan biografi perempuan nusantara terutama pada kaum perempuan yang pernah berjasa pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Buku ini mengungkapkan sepak terjang kaum perempuan nusantara dalam melawan penjajah. Dengan usaha menjelaskan tokoh secara umum dari banyak tokoh yang diungkapkan, dinyatakan bahwa kaum perempuan juga mempunyai pengaruh besar bagi kejayaan nusantara pada masa lalu. Buku ini juga belum menjelaskan secara utuh tentang konflik kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam, dalam hal ini masih dijelaskan secara umum akibat adanya konflik pada aspek politik dan ekonomi. Penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis berusaha untuk menjelaskan lebih detail mengenai konflik kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam dengan melihat bagaimana keempat sultanah masih tetap bertahan sampai tahun 1699 M.

Dalam buku-buku tersebut penulis merasa belum menemukan pembahasan tentang konflik kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1641-1699 M secara detail. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjelaskan konflik kepemimpinan perempuan secara menyeluruh.

E. Landasan Teori

Penulisan ini merupakan penelitian sejarah yang ingin menghasilkan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah terjadi di masa lalu. Penulis mencoba mendeskripsikan mengenai konflik tentang kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1641-1699 M. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis konflik kepemimpinan perempuan, mulai dari awal muncul konflik sampai berakhirnya konflik. Konsep pertama yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah konflik, salah satu kata dari bahasa latin *configure* yang mempunyai arti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai satu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya.¹²

Terkait dengan penelitian ini penulis menggunakan teori konflik yang diungkapkan oleh Ralf Dahrendrof, yang memahami masyarakat dari segi konflik, konflik bertitik tolak dari kenyataan bahwa anggota masyarakat terdiri dari dua kategori yaitu orang yang berkuasa dan mereka yang dikuasai. Dualisme ini yang termasuk struktur dan hakekat dalam kehidupan bersama, sehingga menimbulkan kepentingan yang berbeda-beda dan mungkin saling berlawanan. Pada gilirannya diferensiasi dapat melahirkan kelompok-kelompok yang berbenturan. Menurutnya keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu

¹² Y. Priyo Utomo, *Pengantar Sosiologi; Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 93-94.

hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Namun, konflik tersebut pada dasarnya berawal dari pergumulan politik yang terjadi pada masyarakat.¹³

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh David Lockwood bahwa konflik adalah perselisihan atau permusuhan antara individu atau antar kelompok dalam masyarakat, karena *interest* terhadap kepentingan tertentu. Apabila kepentingan-kepentingan yang berlawanan atau perasaan bermusuhan itu dipendam atau ditekan maka akan menimbulkan beberapa konsekuensi.¹⁴ Salah satunya adalah putusannya hubungan, putusannya hubungan ini dipercepat dengan meledaknya konflik secara tiba-tiba dalam bentuk amukan yang keras.¹⁵ Dengan adanya bentuk ini menjadikan konflik terus berjalan atau akan berakhir dengan adanya kemenangan dari salah satu pihak yang terlibat konflik.

Dengan demikian konflik dalam kehidupan bisa diasumsikan sebagai realitas, karena konflik bisa terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok atau kelompok dengan masyarakat. Konflik bisa terjadi dalam suatu masyarakat hingga mengakibatkan kekacauan strukturnya. Suatu konflik berakhir dengan perundingan atau perdamaian di antara kedua belah pihak, tetapi

¹³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 26.

¹⁴ Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 102.

¹⁵ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern*, terj. Robert MZ. Lawang (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 201.

ada pula yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan dikarenakan kedua belah pihak saling mempertahankan pendapat masing-masing.

Teori tersebut sangat sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni konflik yang terjadi di Kesultanan Aceh Darussalam yang berlatar belakang politik (perebutan kekuasaan), karena tidak adanya putera mahkota yang menyebabkan terjadi perselisihan di antara sesama umat Islam mengenai pergantian pemimpin. Perselisihan ini pada akhirnya membawa konflik antara kelompok pendukung ratu dan kelompok *wujudiyah* (oposisi) yang menolak perempuan menjadi pemimpin. Akibat saling mempertahankan kepentingan masing-masing mengakibatkan peperangan antara dua pihak yang berkonflik.

Konflik mulai reda dengan adanya dukungan ulama Aceh yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin, pada akhirnya masyarakat Aceh menerima dan Safiatuddin Syah menduduki tahta kesultanan Aceh tahun 1641 M. Meskipun demikian konflik ini memuncak kembali karena ketidakpuasan kelompok oposisi terhadap pemerintahan perempuan dan semakin menurunnya kelompok pendukung ratu yang menyebabkan perlawanan semakin besar. Memuncaknya konflik dibarengi dengan kekerasan yang menyebabkan pemerintahan kesultanan hampir lumpuh. Konflik ini berakhir setelah adanya fatwa ulama Mekkah tahun 1699 M yang melarang perempuan menjadi pemimpin dalam sebuah kerajaan Islam, dan perpecahan internal kesultanan yang menyebabkan kelompok pendukung ratu tidak kuat menghadapi tekanan kelompok oposisi.

Penelitian ini menggunakan *pendekatan politik* yang digunakan untuk menganalisis kepentingan individu, bahkan kelompok dalam hubungannya dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Ramlan Surbakti, konflik politik salah satunya disebabkan oleh adanya kemajemukan vertikal yakni struktur masyarakat yang terpolirisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.¹⁶ Penelitian ini juga menggunakan *pendekatan sosiologis* yang mengkaji segi-segi sosial dan budaya suatu peristiwa terutama dalam rangka menggali faktor-faktor sosial yang berpengaruh terhadap munculnya konflik, dan bagaimana hubungan dengan golongan lainnya.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sejarah oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis-analitis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh.¹⁸ Metode sejarah ini bertumpu pada empat langkah yaitu, pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan penulisan (historiografi).¹⁹ Keempat langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

¹⁶ Budi Suyadi, *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2007), hlm. 9.

¹⁷ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 4.

¹⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Noto Susanto (Yogyakarta: Yayasan Penerbit UI Press, 2006), hlm. 33.

¹⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, cet. IV (Jakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hlm. 91.

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Dalam langkah ini peneliti mengumpulkan dan menggali sumber sejarah yang berkaitan erat dengan masalah konflik tentang kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1641-1699 M. Mengingat penelitian ini adalah penelitian literal, maka sumber yang digunakan adalah sumber tertulis, seperti buku-buku yang penulis dapatkan di beberapa perpustakaan. Penulis berusaha mengumpulkan sumber sebanyak mungkin dengan cara mencari di toko-toko buku, dan perpustakaan yang ada di Yogyakarta untuk mendapatkan sumber yang diperlukan. Sumber lain yang di kumpulkan adalah sumber dari media baik berupa majalah, jurnal dan internet yang memiliki kaitan dengan pembahasan ini.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah sumber terkumpul penulis melakukan kritik terhadap sumber tersebut. Untuk menguji keabsahan sumber (otentisitas) dilakukan dengan kritik ekstern, sedangkan mengenai keshahihan sumber (kredibilitas) dilakukan melalui kritik intern.²⁰ Dalam hal ini penulis melakukan kritik ekstern maupun intern terhadap sumber-sumber yang didapatkan berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini. Dengan menyeleksi dari segi luar kertas yang dipakai, tinta, gaya tulisan, bahasa, kalimat, ungkapan, huruf serta tahun penerbit dan segi penampilan luar yang lain. Dari segi dalamnya, dengan cara membandingkan isi sumber yang satu dengan sumber yang lain.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 101.

3. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi, yaitu penafsiran fakta yang saling berhubungan dari data yang telah teruji kebenarannya. Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis terhadap sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama dengan teori disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Dalam melakukan analisis ini penulis terlebih dahulu menentukan poin-poin peristiwa, menghubungkan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Sesuai dengan informasi yang terdapat dalam sumber yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan tentang rangkaian peristiwa secara menyeluruh. Kemudian penulis melakukan analisis dan mesintesis data yang diperoleh dari sumber tersebut, dengan menggunakan pendekatan *politik* dan *sosiologis* serta menggunakan teori konflik *Ralf Dahrendorf*.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Fase terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan sejarah, yang selalu memperhatikan pada aspek kronologis.²¹ Dalam langkah terakhir ini, penulis memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya, sehingga bisa menghasilkan rangkaian tulisan sejarah yang kronologis dan bermakna.

²¹ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 76.

G. Sistematika Pembahasan

Penyajian penelitian dalam bentuk skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan, yang didalamnya diuraikan beberapa pokok mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan sebagai gambaran umum dan landasan bagi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua membahas mengenai latar belakang munculnya kepemimpinan di Kesultanan Aceh Darussalam. Bab ini membahas faktor politik, faktor sosial keagamaan dan faktor ekonomi. Pembahasan ini penting untuk mengetahui situasi perkembangan secara detail dan berhubungan dengan bab selanjutnya.

Bab ketiga membahas mengenai pro dan kontra kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1641-1699 M. Dalam bab ini dibahas mengenai awal mula munculnya penguasa perempuan, masa konflik pemerintahan perempuan dan dukungan ulama terhadap pemerintahan perempuan. Hal ini menjadi fokus kajian penelitian yang berusaha mengungkap konflik tentang kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam.

Bab keempat membahas tentang pengaruh kepemimpinan perempuan Kesultanan Aceh Darussalam. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi dengan adanya konflik kepemimpinan perempuan. Bab ini menganalisis pengaruh konflik kepemimpinan perempuan terhadap hilangnya daerah kekuasaan Aceh dan kedudukan perempuan di Aceh. Dengan melihat

pengaruh yang ditimbulkan dapat mengetahui pengaruh positif dan negatif yang terjadi dari konflik kepemimpinan perempuan.

Bab kelima adalah bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat yang merupakan jawaban atas masalah yang telah dibahas dengan melewati tahap analisis. Saran-saran ini ditunjukkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian dengan mengambil objek tentang konflik kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam akan menjadi semakin sempurna.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik kepemimpinan perempuan yang terjadi di Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1641-1699 M, harus dilihat dari banyak faktor seperti politik, agama dan ekonomi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kombinasi dari berbagai faktor seperti, tidak adanya putera mahkota, merosotnya kekuasaan para sultan ditandai dengan meningkatnya kekuasaan para orang kaya serta pembagian Aceh ke dalam tiga sagi yang kuat ini merupahakan faktor-faktor penentu muncul dan bertahannya pemerintahan perempuan di Aceh.

Sumber yang ada memang tidak menguraikan informasi secara detail tentang kronologi konflik, setidaknya data yang ada memberikan gambaran bagaimana konflik itu terjadi. Konflik ini terjadi pada tahun 1641 M setelah meninggalnya Sultan Iskandar Tsani yang tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris tahta. Akibat dari tidak adanya pewaris tahta inilah kemudian memunculkan krisis sosial-politik yang berakibat pada munculnya pihak-pihak yang saling berebut pengaruh untuk menduduki kekuasaan di Kesultanan Aceh Darussalam. Untuk menghindari krisis semakin sulit maka ditunjuk Safiatuddin Syah sebagai ratu, namun sebelum pengangkatannya terjadi perselisihan mengenai sah tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Kelompok yang menolak Kesultanan Aceh Darussalam dipimpin oleh perempuan adalah kelompok

wujudiyah yang didukung politisi tertentu yang memfatwakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Meskipun demikian kelompok yang mendukung pemerintahan perempuan menyatakan perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, sehingga perempuan boleh menjadi pemimpin. Kelompok ini didukung oleh ulama besar Aceh seperti Nuruddin al-Raniri dan Abdurrauf Singkel, kedua ulama ini memberikan fatwa pemisahan antara urusan agama dan negara, dengan demikian ulama ini memberikan toleransi bagi perempuan Aceh untuk menduduki tahta di Kesultanan Aceh Darussalam. Kegagalan para orang kaya merebut kekuasaan tertinggi memberikan makna bahwa masyarakat dan para petinggi Aceh yang lain masih memegang teguh pandangan bahwa hanya keluarga kerajaan (*royal family*) yang berhak menjadi penguasa.

Perempuan pertama yang menduduki kursi Kesultanan Aceh Darussalam adalah Sultanah Safiatuddin Syah 1641-1675 M, yang dilanjutkan oleh tiga penguasa berikutnya yaitu: Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah 1675-1678 M, Sultanah Zakiatuddin Syah 1678-1688 M dan Sultanah Kamalat Syah 1688-1699 M. Masa pemerintahan sultanah pertama perjalanan pro dan kontra mengenai kepemimpinan perempuan sebagai awal lahirnya konflik dan munculnya dua kelompok yakni pendukung ratu dan kelompok penentang kepemimpinan perempuan (oposisi). Konflik yang terjadi masa Sultanah Safiatuddin Syah belum terlihat jelas, sebab sultanah mampu mengendalikan kelompok oposisi dengan bantuan mufti kesultanan. Selain itu, sultanah juga

mengambil sikap tegas terhadap kelompok oposisi yang menentang pemerintahannya.

Masa pemerintahan perempuan kedua Sultanah Nurul Alam terjadi perubahan dalam pemerintahan dengan petunjuk oleh mufti kesultanan Abdurrauf Singkel. Di antara perubahan itu mengenai penyempurnaan *Qanum Meukata Alam* dan pembentukan Federasi Tiga Sagi sebagai gabungan dari beberapa mukim yang membentuk aliansi dengan mengorganisir diri menjadi Tiga Federasi 22 mukim, 25 mukim dan 26 mukim, yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Tiga Sagi yang berada di Aceh Rayek (Aceh Besar).

Kondisi internal yang semakin lemah akibat perebutan kekuasaan menjadikan konflik semakin memuncak, sebab para orang kaya, Panglima Sagi dan *uleebalang* memainkan peranan masing-masing sehingga sultanah hanya dijadikan simbol kekuasaan. Akibat dari banyak wilayah yang independen menjadikan kekuasaan ratu dan menteri semakin berkurang dan hanya efektif di ibukota kesultanan. Situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok oposisi dan berhasil membakar Istana Darud-Dunia, Masjid Baiturrahman dan Balai Mahkamah Rakyat yang mengakibatkan pemerintahan perempuan hampir lumpuh.

Pada saat ratu ketiga Sultanah Zaqiatuddin naik tahta hanya didukung oleh Panglima Tiga Sagi, mufti kesultanan dan sebagian orang kaya, sehingga kekuatan sultanah semakin berkurang. Pada masa inilah sering terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok oposisi termasuk *wujudiyah* yang memprovokasi masyarakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

Perubahan-perubahan yang terjadi masa pemerintahan sultanah Nurul Alam dan kebebasan yang dimiliki oleh orang kaya, panglima sagi dan *uleebalang* menjadikan konflik ini semakin meningkat, sebab mereka mementingkan diri sendiri. Pada akhirnya kondisi ini mempercepat berakhirnya pemerintahan perempuan dan adanya fatwa dari Mekkah yang menyatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, maka Sultanah Kamalat Syah dimakzulkan dari tahta Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1699 M. Penggantinya adalah Syarif Mekkah bernama Syarif Hasyim Jamal al-Din sebagai penguasa Aceh yang menandakan berdirinya Dinasti Arab di Aceh.

Pengaruh konflik kepemimpinan perempuan terlihat ketika wilayah kekuasaan Aceh yang dahulunya luas sekarang banyak yang melepaskan diri akibat sultanah tidak mampu memberikan perlindungan terhadap wilayah kekuasaannya. Dengan demikian hilangnya kekuasaan Aceh membawa dampak ekonomi yang berat bagi Aceh, karena pemasukan dari wilayah taklukan semakin berkurang. Konflik kepemimpinan perempuan secara tidak langsung membawa dampak positif bagi kedudukan perempuan di Aceh. Sebab sultanah sangat memperhatikan mengenai kedudukan perempuan dan usaha untuk meningkatkan kedudukan perempuan dengan cara memberi kebebasan bagi perempuan untuk belajar yang bekerja sesuai dengan keahliannya.

B. Saran

Konflik adalah sebuah fenomena yang selalu menyertai kehidupan manusia, konflik juga sering melanda berbagai kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia, termasuk juga Kesultanan Aceh Darussalam. Melihat kenyataan demikian sebaiknya selalu diambil langkah pencegahan sebelum konflik itu menjadi besar, karena akan menimbulkan kerugian besar baik harta maupun jiwa. Skripsi ini adalah bagian dari upaya penulis untuk mengkaji Kesultanan Aceh Darussalam dari aspek konflik kepemimpinan perempuan yang pernah memerintah kesultanan Aceh Darussalam hampir selama 60 tahun. Harapannya, akan ada di kemudian hari penelitian lanjutan mengenai Kesultanan Aceh Darussalam dari sudut yang lain.

Untuk menyempurnakan karya ilmiah ini, penulis berharap ada peran aktif dari pembaca untuk memberikan saran dan kritik atas karya ilmiah ini. Dengan demikian, bisa memberikan informasi yang objektif bagi masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan tentang sejarah Islam, terutama mengenai konflik kepemimpinan perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam. Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis di dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufiq, dkk. *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: MUI, 2003.
- Adurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007.
- Aly, Ainal Mardiah. "Pergerakan Wanita di Aceh Masa Lampau sampai kini", Ismail Suny. *Bunga Rampai tentang Aceh*. Jakarta: Bharatara Karya Askara, 1980.
- Afadlal. dkk. *Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Amin, Mansyur. *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*. Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988.
- Amran, Rusli. *Sumatra Barat hingga Plakat Pajang*. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana, 2007.
- _____, (ed.). *Prespektif Islam Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indoensia, 1989.
- Daudy, Ahmad. *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syekh Nuruddin ar-Raniri*. Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- _____, Tinjauan Atas: "Fathul Mubbin 'Alal Mulhidin", Karya Syekh Nuruddin al-Raniri. Ahmad Rifai Hasan. *Warisan Intelektual Islam Telaah Atas Karya-Karya Klasik*. Bandung: Mizan, 1999.
- Djajadiningrat, Hoesein. *Kesultanan Aceh: Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh Berdasarkan Bahan-Bahan yang Terdapat dalam Karya Melayu*. Terj. Teuku Hamid. Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1983.
- Fathurahman, Oman. *Menyoal Wahdatul Wujud Kasus Abdurrauf Singkel Abad XVII*. Bandung: Mizan, 1999.

- Hadi, Amirul. *Aceh, Sejarah, Budaya dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- _____, *Islam and State in Sumatra*. Leiden: E. J. Brill, 2004.
- Hamka. *Sejarah Umat Islam*. Jilid IV. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Dari Perbendaharaan Lama*. Jakarta: Panji Pustaka, 1982.
- Harun, Yahya. *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI-XVII*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1995.
- Hasjmy, A. *59 Tahun Aceh di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- _____, *Syiah dan Ahlulsunnah saling Berebut Pengaruh dan kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Huda, Nor. *Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Ibrahim, Muhammad. *Sejarah Propinsi daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1978.
- Ibrahim, Teuku. *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*. Yogyakarta: Ceninnets, 2004.
- Jamil, Fadhullah. "Kerajaan Aceh Darussalam dan Hubungannya dengan Semenanjung Tanah Melayu". A. Hasjmy. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Al-Maarif, 1989.
- Jumsari, Jusuf (ed.). *Tajussalatin*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1979.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern*. Terj. Robert MZ. Lawang. Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*. Jilid I. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.

- _____. *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: LP3S, 1984.
- _____. *Pendekatan Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Cet. IV. Jakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Noto Susanto. Yogyakarta: UI Press, 2006.
- Mernisi, Fatimah. *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*. terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1994.
- Meuraka, Dada. *Sejarah Kebudayaan Sumatra*. Medan: Firman Hasmar, 1974.
- Mukhtar, Naqiyah. *Kontroversi Presiden Perempuan Studi terhadap Pandangan Musafir dan Media di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2009.
- Mulyana, Slamet. *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Jakarta: Bahratar, 1968.
- Muthari, Murtadha. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Terj. Ummu Munaya. Jakarta: YAPI, 1992.
- Poesponegoro, Marwati Djoned, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Reid, Anthony. *Menuju Sejarah Sumatra antara Indonesia dan Dunia*. Terj. Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- _____. *Dari Ekspansi hingga Krisis Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680*. Terj. R. Z. Leirissa. Jilid II. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terj. Alimandan. Jakarta: Raja Graafindo Persada, 2004.
- Said, M. *Aceh Sepanjang Abad*. Jilid I. Medan: PT. Percetakan dan Penerbitan Waspada, 1981.

Sofyan, Ismail. *Wanita Utama Nusantara dalam Lintas Sejarah or Prominent Women in the Glimpse of History*. Terj. Bakdi Sumanto. Jakarta: Jayakarta Agung, 1994.

Scrieke. *Indonesian Sociological Studies*. Part two. Bandung: W. Van Hoeve, 1957.

Suhaimi, Emi. *Wanita Aceh dalam Pemerintahan dan Peperangan*. Banda Aceh: yayasan Pendidikan A. Hasjmy, 1993.

Sukri, Sri Suhandjati. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Suryadi, Budi. *Sosiologi Politik: Sejarah, Defenisi dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2007.

Usman, Abdullah Rani. *Sejarah Peradaban Aceh Suatu Analisis Interaksionis Integrasi dan Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Utomo, Y. Priyo. *Pengantar Sosiologi: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Yunus, Mahmud. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Al-Maarif, 1999.

Yusuf, Mundzirin, dkk. *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka, 2006.

Zakaria, Ahmad. *Sekitar Kerajaan Aceh dalam 1520-1675 M*. Medan: Menora, 1973.

Zainuddin, M. *Tarikh Atjeh dan Nusantra*. Medan Pustaka Iskandar Muda, 1961.

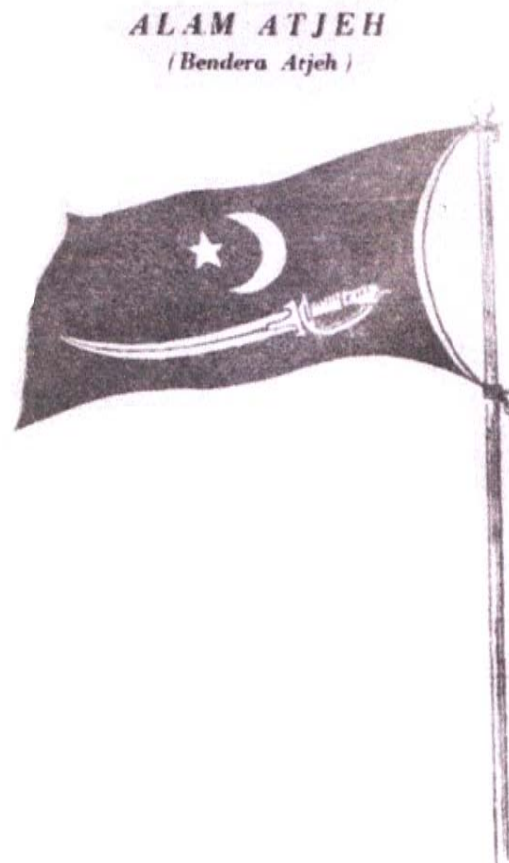
_____. *Srikandi Aceh*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1966.

Jurnal

Mafthuhah, Fariichatul. "Responsisi Perempuan dalam Kepemimpinan". *Jurnal Study Gender*. Vol. 3. No. 2. Juli-Desember, 2008.

Internet http://kesultanan_aceh.t34.com/kedudukan_perempuan_aceh. Htm. Update 02/04/2011.

lampiran 1

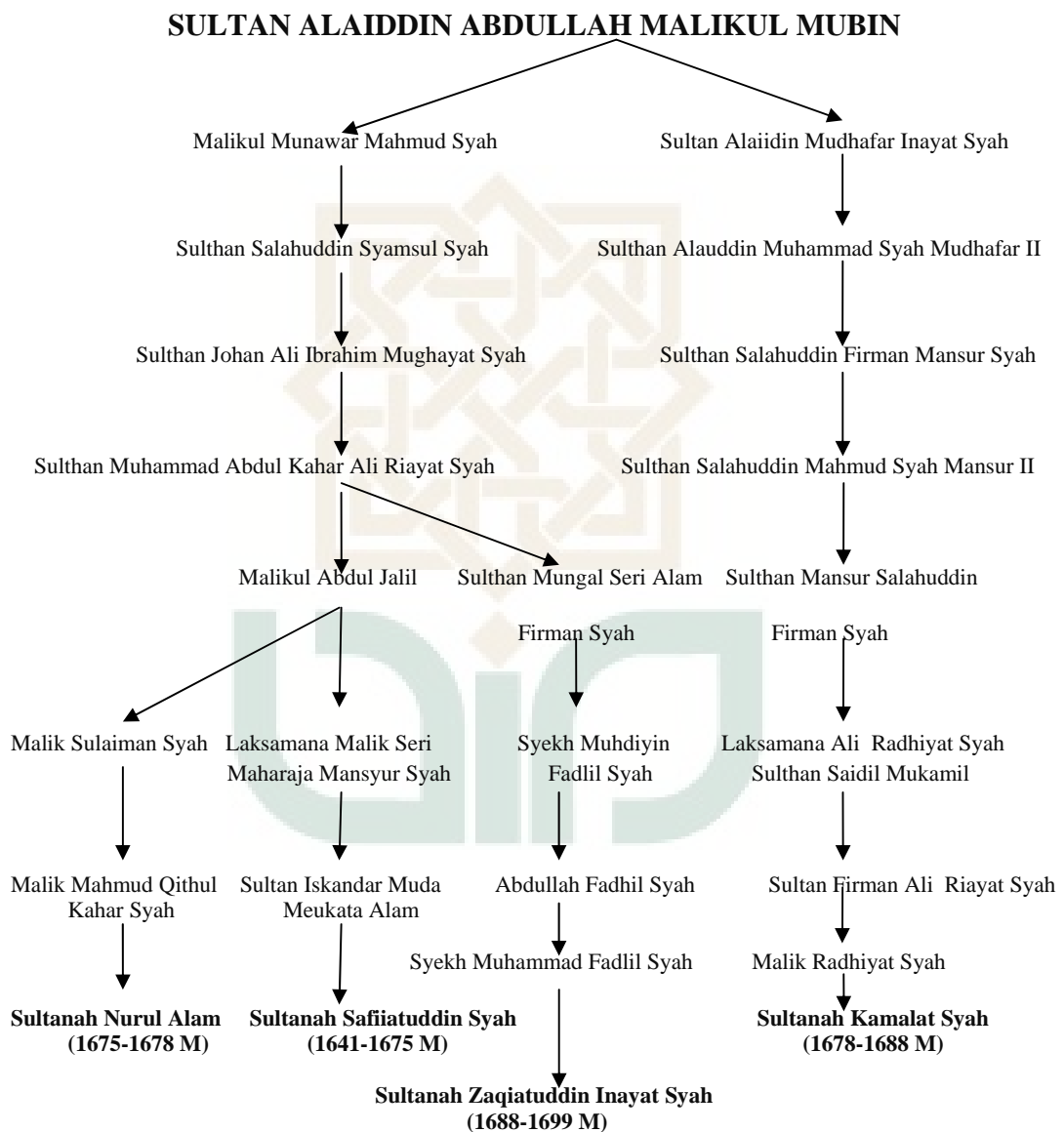


Gambar di atas adalah Alam Zulfiqar (Bendera) dari Kesultanan Aceh Darussalam yang memiliki warna dasar putih sedangkan bintang, bulan sabit dan pedang berwarna merah.

Sumber: M. Zainuddin. *Tarikh Atjeh dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.

Lampiran 2

**SILSILAH SULTANAH YANG MEMERINTAH KESULTANAN ACEH
DARUSSALAM**



Sumber : A. Hasjmy. *59 Tahun Aceh di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Lampiran 3

**SULTANAH SAFIATUDDIN SYAH**

Gambar ini adalah lukisan Sultanah Safiatuddin Syah seperti yang dilukiskan oleh seorang pelukis Belanda yang pernah melihatnya.
Memerintah Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1641-1675 M

Sumber: A. Hasjmy. *59 Tahun Aceh di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Jayakarta Agung, 1977.

Lampiran 4

**SULTANAH NURUL ALAM NAQIATUDDIN SYAH**

Gambar ini adalah lukisan Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah, seperti yang dilukiskan oleh seorang pelukis Belanda yang pernah melihatnya. Memerintah Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1675-1678 M

Sumber: A. Hasjmy. *59 Tahun Aceh di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Jayakarta Agung. 1977.

Lampiran 5

**SULTANAH ZAQIATUDDIN INAYAT SYAH**

Gambar ini adalah lukisan Zaqiatuddin Inayat Syah, seperti yang dilukiskan oleh seorang pelukis Belanda yang pernah melihatnya.
Memerintah Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1678-1688 M

Sumber: A. Hasjmy. *59 Tahun Aceh di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Jayakarta Agung. 1977.

lampiran 6



SULTANAH KAMALAT SYAH

Gambar ini adalah lukisan Zakiatuddin Inayat Syah, seperti yang dilukiskan oleh seorang pelukis Belanda yang pernah melihatnya.
Memerintah Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1688-1699 M

Sumber: A. Hasjmy. *59 Tahun Aceh di Bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Jayakarta Agung. 1977.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Supriyono
Tempat/tgl. Lahir : Tambang Baru, 02 Mei 1988
Nama Ayah : Giyanto
Nama Ibu : Suratinem
Asal Sekolah : MA Negeri Bangko
Alamat Rumah : Tambang Baru Rt 03/01, Kec. Tabir Lintas. Kab. Merangin. Jambi. 37353
E-Mail : Supriyono6@gmail.com
Alamat Yogyakarta : Nglahar Rt 04/31, Sumbersari, Sleman, Yogyakarta.
Golongan Darah : O
No. Hp : 087738615118

B. Riwayat Pendidikan


1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri Tambang Baru lulus tahun 2001
- b. MTS Negeri Bangko lulus tahun 2004
- c. MA Negeri Bangko lulus tahun 2007
- d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007-sekarang

C. Pengalaman Organisasi

- a. Kaderisasi HMI Adab dan Ilmu Budaya 2007-2008
- b. Pengurus HMI Adab dan Ilmu Budaya 2008-2009
- c. Pengurus (BEM F) Fakultas Adab dan Ilmu Budaya 2009-2010
- d. Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Masjid al-Fath Nglahar 2010-sekarang

Yogyakarta, 24 Oktober 2011


Supriyono
NIM. 07120022